

**STRATEGI PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 52
TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA PINJAMAN
BAGI PENGUSAHA MIKRO DI KABUPATEN SITUBONDO**

***POVERTY ALLEVIATION STRATEGY THROUGH THE
IMPLEMENTATION OF SITUBONDO REGENT REGULATION NO. 52 OF
2025 ON LOAN INTEREST SUBSIDIES FOR MICRO-ENTREPRENEURS
IN SITUBONDO REGENCY***

Usrotul Hasanah¹⁾, Senain²⁾

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Univesitas Abdurachman Saleh Situbondo

¹Email : usrotulhasanah@unars.ac.id

Naskah diterima tanggal 10-06-2026, disetujui tanggal 18-06-2026, dipublikasikan tanggal 29-06-2026

ABSTRAK

Kemiskinan adalah salah satu penyakit suatu negara, sehingga harus disembuhkan atau paling tidak dikurangi. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pengentasan kemiskinan melalui Peraturan Bupati Nomer 52 Tahun 2025 Tentang Tatacara Pemberian Subsidi Bunga Pinjaman Kepada Pengusaha Mikro di Kabupaten Situbondo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh berasal dari hasil wawancara dan observasi di UMKM-UMKM yang ada di Kabupaten Situbondo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam strategi pengentasan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam hal ini diwakili Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan memberikan modal usaha dengan memberikan subsidi bunga pinjaman kepada UMKM bekerja sama dengan BTN. Bentuk kerjasama tertuang dalam program Vorsa (Voucher Usaha, Pelatihan kerja dan Pinjaman Modal). Tujuan Program Vorsa Membantu UMKM mendapatkan modal tanpa bunga untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan daya saing. Program Vorsa UMKM di Kabupaten Situbondo menyediakan pinjaman modal tanpa bunga khusus untuk pelaku usaha mikro (UMKM) seperti pedagang kecil, dengan plafon pinjaman hingga Rp 20 juta, skema pengembalian ringan, dan bunga ditanggung Pemkab, bertujuan memperkuat ekonomi rakyat kecil dengan kerjasama perbankan.

Kata Kunci : kemiskinan; peraturan; pinjaman; Kabupaten Situbondo

ABSTRACT

Poverty is a disease in a country and must be cured or at least reduced. Therefore, poverty alleviation efforts must be carried out comprehensively. This study aims to determine the poverty alleviation strategy through Regent Regulation Number 52 of 2025 concerning Procedures for Provision of Loan Interest Subsidies to Micro-Entrepreneurs in Situbondo Regency. This study uses a qualitative approach. Data obtained from interviews and observations at MSMEs in Situbondo Regency. The results of this study indicate that in its poverty alleviation strategy, the Situbondo Regency Government,

represented by the Cooperatives, Industry, and Trade Office, provides business capital by subsidizing loan interest to MSMEs in collaboration with BTN. This collaboration is reflected in the Vorsa (Business Vouchers, Job Training, and Capital Loans) program. The Vorsa program aims to help MSMEs obtain interest-free capital to expand their businesses and increase competitiveness. The Vorsa UMKM program in Situbondo Regency provides interest-free capital loans specifically for micro-enterprises (MSMEs), such as small traders, with a loan limit of up to IDR 20 million, a low repayment scheme, and interest borne by the Regency Government. The goal is to strengthen the economy of smallholders through banking collaboration.

Keywords: *poverty; regulation; loans; Situbondo Regency*

PENDAHULUAN

Upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilakukan secara terpadu (Dunn, 2023). Kemiskinan erat kaitannya dengan kapasitas dan jumlah penduduk dalam suatu daerah itu sendiri (Hajar, 2022). Kemiskinan terjadi karena banyak faktor, salah satunya adalah pengangguran. Ada beberapa masalah dalam pengangguran menurut jenisnya, yaitu pengangguran normal, pengangguran siklikal, pengangguran struktural, dan pengangguran teknologi. Kemudian menurut cirinya yaitu pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, pengangguran bermusim, dan setengah menganggur (Mathis & Jackson, 2005).

Menurut BAPPENAS (1998), upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui penguatan penduduk miskin yang mencakup pengembangan sumber daya manusia, penyediaan modal kerja, penciptaan peluang usaha, pengembangan kelembagaan, dan pelayanan yang sederhana serta efisien. Melalui jalur pendekatan tersebut, penduduk miskin diharapkan mampu dengan kekuatan sendiri menanggulangi kemiskinannya serta meningkatkan kesejahteraannya secara memadai dan berkelanjutan.

Kabupaten Situbondo dengan penduduk miskin ± 78.020 jiwa per bulan september 2025 pemerintah berusaha mencari formulasi untuk menurunkan kembali angka kemiskinan di Kabupaten Situbondo dengan beberapa program yang digagas melalui Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yakni program Vorsa (Voucer Usaha, Pelatihan kerja dan pinjaman modal). Program Vorsa UMKM di Kabupaten Situbondo adalah program yang menyediakan

pinjaman modal tanpa bunga khusus untuk pelaku usaha mikro (UMKM) seperti pedagang kecil, dengan plafon pinjaman hingga Rp 20 juta, skema pengembalian ringan, dan bunga ditanggung pemerintah kabupaten, bertujuan memperkuat ekonomi rakyat kecil dengan kerjasama perbankan dalam hal ini Bank Tabungan Negara (BTN) (Agustino, 2016).

Program ini resmi diluncurkan Oktober 2025 dan telah banyak UMKM yang mengajukan untuk modal usaha (Badan Pusat Statistik, 2025). Dengan banyaknya UMKM di Kabupaten Situbondo ± 8.700 unit usaha mikro 1.414 sudah mengajukan pinjaman. Program Vorsa ini payung hukumnya ada di peraturan bupati Nomor 52 Tahun 2025 Tentang Tatacara Pemberian Subsidi Bunga Pinjaman Kepada Pengusaha Mikro di Kabupaten Situbondo dengan dasar hukum ini diharapkan memperkuat perekonomian di Kabupaten Situbondo khususnya ekonomi mikro. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan berupaya melakukan sosialisasi dengan bekerjasama dengan kecamatan – kecamatan yang ada. Sosialisasi program Vorsa ini gencar dilakukan melalui media sosial, dan pertemuan di tingkat kecamatan untuk memberikan pemahaman alur dan tahapan pengajuan. Sosialisasi dan peluncuran vorsa UMKM ini telah dilaksanakan di Kecamatan Panji pada awal Mei 2025 yang dihadiri langsung oleh Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo, S.Sos., M.SM, untuk mewujudkan program tersebut, Pemkab Situbondo mengalokasikan anggaran sekitar Rp4 miliar hingga Rp5 miliar. Dana ini tidak digunakan sebagai bantuan modal langsung, melainkan untuk membayar bunga pinjaman yang diberikan pelaku UMKM ke bank.

“Pelaku UMKM tidak perlu khawatir soal bunga pinjaman. Pemkab akan menanggung bunganya dengan budget Rp4 miliar hingga Rp5 miliar. Ini adalah wujud nyata dukungan kami agar UMKM bisa berkembang” ujar Bupati yang akrab disapa Mas Rio, saat membuka acara Sosialisasi UMKM naik kelas di Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Diterbitkan oleh: Bhirawa Online 8 Mei 2025

Vorsa UMKM, lanjut Mas Rio tidak hanya menyediakan bunga nol persen, melainkan juga pelatihan dan pembinaan serta pendampingan berkelanjutan untuk membantu pelaku UMKM, naik kelas.

“Pelatihan UMKM meliputi kewirausahaan, keamanan pangan, standarisasi produk, pengelolaan keuangan, pemasaran, hingga distribusi produk”, beber Mas Rio.

Diterbitkan oleh: Bhirawa Online 8 Mei 2025

Program vorsa ini berlatar belakang dari berbagai masalah yang di hadapi oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah terutama dalam pembiayaan atau modal awal tersebut. Menurut kepala bidang Usaha Mikro di kantor disperindag permasalahan tersebut adalah salah satu acuan dari pengadaan vorsa ini dan juga merupakan janji dari Bupati Situbondo untuk memajukan UMKM yang ada. Program ini terdapat beberapa persyaratan yang harus di penuhi oleh pengaju untuk menerima vocer usaha ini salah satunya yaitu memiliki NIB, orang yang tidak menerima dana Kredit Usaha Rakyat (KUR), berdagang berjalan minimal 1 sampai 2 tahun, pelaku Usaha Mikro berdomisili di Kabupaten Situbondo, tidak berjualan dengan merubah-rubah jualannya dan yang paling utama adalah pelaku UMKM yang tidak menjadi anggota DPR, atau pegawai negeri.

Ada 4 pelaku UMKM yang Sudah tercairkan dari 1.414 pelaku usah. Kepala Bidang Usaha Mikro menuturkan bahwa dari sekian banyak pendaftar yang masuk dalam ruang lingkup Bank BTN yaitu radius 15 kilometer ini terdapat 200 lebih yang terkena slip dan 170 an yang terbebas dari slip dalam artian tidak memiliki pinjaman kepada bank lain. Bantuan ini masih bekerja sama dengan satu instansi keuangan, yaitu Bank BTN dengan jangkauan sekitar 15 kilometer sehingga banyak daerah masih mengalami kesulitan dalam mencairkan voucher usaha. Dinas koprasi, perindustrian, dan perdagangan dalam tahun 2026 berusaha bekerjasama dengan bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan Badan Pendapatan Daerah (BPD) Jatim agar kecamatan-kecamatan yang tidak masuk dalam zona Bank BTN ini dapat tercairkan.

Melalui program ini masyarakat Situbondo sangat terbantu karena bunga yang biasanya dari pihak bank itu besar bisa menjadi nol persen dan juga pelaku usaha mikro kecil atau menengah dapat mengembangkan usahanya menjadi besar, hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara berikut: Ibu Ratna (22 Januari 2026: 10.30)

“Saya awalnya berjualan hanya memakai meja saja sekarang bisa beralih menggunakan gerobak, sehingga dapat berpengaruh dari pendapatan saya sendiri yang awalnya pendapatan itu 20% sekarang naik menjadi 50%.”

Terdapat pemantauan berkelanjutan untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan efektif. Tantangan dilapangan diidentifikasi dan dicari solusinya, dan penyesuaian dilakukan sesuai kebutuhan. Berikut merupakan data Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang menerima bantuan program vorsa UMKM.

Tabel 1. Data UMKM Penerima Vorsa

No	Nama	Kecamatan	Usaha	Nominal
1.	Sri Wahyuni	Panji	Jihu	15.000.000
2.	Nuni	Panji	Kantin	15.000.000
3.	Ratna	Panji	Bakso	15.000.000
4.	Anis	Panji	Olahan Kue	15.000.000

Sumber data: vorsaumkm.situbondokab.go.id

Selain pinjaman modal usaha vorsa strategi yang dilakukan untuk pengentasan kemiskinan juga memberikan pelatihan. Pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas pelaku usaha agar dapat bersaing di pasar lokal maupun pasar internasional. Fokus utama pelatihan dalam program ini meliputi: Pelatihan Kewirausahaan: Memberikan bekal manajemen bisnis dasar agar UMKM mampu mengelola operasional usaha dengan lebih profesional. Peningkatan Keterampilan & Produktivitas: Pelatihan teknis yang bertujuan meningkatkan kualitas produk dan efisiensi produksi. Keamanan Pangan: Khusus bagi pelaku usaha di bidang kuliner, diberikan edukasi mengenai standar keamanan dan kelayakan konsumsi produk. Pemasaran Digital: Pendampingan agar pelaku UMKM dapat memanfaatkan teknologi dan platform digital untuk memperluas jangkauan pasar mereka. Pendampingan Berkelanjutan:

Program ini tidak hanya berhenti pada pelatihan satu kali, tetapi mencakup pembinaan dan pendampingan terus-menerus untuk memastikan UMKM bisa "Naik Kelas". Pelatihan pada usaha mikro sebagai salah satu penanganan pengentasan kemiskinan.

Peranan pengusaha mikro menjadi salah satu alternatif penyediaan lapangan kerja baru (Marijan, 2005). UMKM berperan baik dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan sebagai program pengentasan kemiskinan maupun penyerapan tenaga kerja (Marijan, 2005). Dalam beberapa tahun kedepan, potensi pengembangan UMKM di berbagai bidang usaha masih terbuka lebar. Akan tetapi, pada saat ini pengembangan UMKM masih dihadapkan pada berbagai permasalahan, terutama berkaitan dengan pengembangan tenaga kerja, modal, bahan baku, teknologi, kemampuan dan pemasaran hasil-hasil produksi.

Permasalahan keterbatasan akses permodalan, rendahnya kapasitas usaha, serta minimnya literasi keuangan merupakan tantangan yang dihadapi oleh sebagian besar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Situbondo. Kondisi tersebut berkontribusi terhadap rendahnya daya saing usaha dan berdampak pada tingginya angka kemiskinan di daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Situbondo berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi, salah satunya melalui Program Vorsa yang memberikan subsidi bunga pinjaman bagi pelaku usaha mikro.

Program ini diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Situbondo Nomor 52 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga Pinjaman kepada Pengusaha Mikro di Kabupaten Situbondo. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan akses pembiayaan usaha melalui pemberian subsidi bunga pinjaman hingga 0%, sehingga pelaku usaha mikro dapat memperoleh modal usaha dengan lebih mudah dan terjangkau. Selain bantuan permodalan, pemerintah juga memberikan pelatihan dan pendampingan usaha guna meningkatkan kapasitas serta keberlanjutan usaha mikro. Kebijakan subsidi bunga pinjaman ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan usaha mikro,

meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta berkontribusi terhadap upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Situbondo. Mengingat kebijakan ini merupakan program prioritas pemerintah daerah yang baru diimplementasikan, kajian mengenai efektivitas dan strategi pelaksanaannya menjadi penting untuk dilakukan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan dengan judul “Strategi Pengentasan Kemiskinan Melalui Peraturan Bupati Situbondo Nomor 52 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga Pinjaman kepada Pengusaha Mikro di Kabupaten Situbondo.” Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana strategi pengentasan kemiskinan melalui pemberian subsidi bunga pinjaman kepada pengusaha mikro di Kabupaten Situbondo; dan (2) apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut.

Secara teoritis, penelitian ini menggunakan perspektif pengentasan kemiskinan yang dikemukakan oleh Shanon, Kpicker, Cheyne, O’Brien, dan Belgrave dalam pendekatan Neo-Liberal, yang memandang bahwa kemiskinan berkaitan dengan keterbatasan kapasitas individu dalam mengakses peluang ekonomi. Oleh karena itu, perluasan akses terhadap sumber daya ekonomi, termasuk akses pembiayaan usaha dan penguatan kapasitas pelaku usaha, dipandang sebagai salah satu strategi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif (Sugiyono, 2018). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Field Research*, atau penelitian lapangan (Fattah, 2023). Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Situbondo. Fokus penelitian adalah Strategi Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberian Subsidi Bunga Pinjaman 0% (Program Vorsa) Kepada Pengusaha Mikro di Kabupaten Situbondo. Penentuan sejumlah informan kunci melalui teknik *purposive sampling* yang dinilai memenuhi kriteria untuk

dijadikan sebagai informan kunci dan dapat memberikan informasi terkait dengan penelitian (Sugiyono, 2018). Informan yang ditentukan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Informan kunci: Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo b. Informan pendukung: UMKM yang ada di Kabupaten Situbondo.

Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik, seperti studi pustaka, observasi, dokumentasi, wawancara, survei, penyebaran angket, serta pengukuran sesuai dengan kebutuhan penelitian. Alat untuk pengumpulan data dapat berupa alat perekam, alat ukur, *draft* wawancara atau alat elektronik dan sebagainya (Fattah, 2023). Adapun sumber data kualitatif yang digunakan sebagai berikut :

- a. Data Primer : Data yang diperoleh secara langsung terkait Program Vorsa
- b. Data Sekunder: Data yang diperoleh dari hasil pengambilan dokumen-dokumen yang berada di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo, UMKM, lapangan, berita yang dimuat dimedia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Masalah utama yang dihadapi dalam mendukung kegiatan operasional di semua jenis usaha, baik kecil maupun besar, adalah ketersediaan modal yang tidak ada habisnya. Modal mencakup segala hal yang berwujud untuk menunjang kegiatan operasional di semua kegiatan usaha. Tanpa adanya modal, usaha tidak akan dapat berkembang (Marijan, 2005), hal ini juga sama dengan penelitian ini, langkah-langkah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo dalam upaya Pemberdayaan UMKM yang pertama melalui permodalan. Seperti saat wawancara dengan kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo.

“Setelah sumber daya manusia sudah mumpuni dan mampu menerapkan pelatihan yang sudah kami ajarkan, hal berikutnya yang paling penting di permodalan itu sendiri”.

Permodalan atau Dana merupakan faktor yang sangat penting dalam setiap pelaksanaan kegiatan. Tanpa adanya dana atau anggaran maka sudah dapat dipastikan setiap program atau kegiatan yang sudah direncanakan tidak akan bisa dilaksanakan. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo sebagai pemberi informasi terhadap UMKM dalam pemberian bantuan permodalan dengan bunga 0% yang akan diberikan kepada UMKM melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Situbondo seperti yang dikatakan oleh Kepala Dinas bahwa :

“Pemberian subsidi bunga pinjaman pada pengusaha mikro Tahun 2025. Program bantuan bagi pelaku usaha mikro adalah strategi untuk membantu pelaku usaha mikro agar bertahan dan bangkit dengan besaran bantuan yang diterima 20 juta namun itu harus memenuhi syarat pinjamannya. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo mendata pelaku UMKM dan sebagai pengusul saja selebihnya pihak bank yang memutuskan siapa yang layak menerima subsidi bungan pinjaman 0% pelaku usaha mikro tersebut.”

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa upaya fasilitasi akses permodalan bagi UMKM oleh dinas lebih difokuskan pada kerjasama dengan lembaga keuangan yang menyediakan program khusus UMKM dengan bunga rendah, seperti BTN melalui program Vorsa. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi utama saat ini adalah memastikan UMKM dapat memperoleh pembiayaan yang mudah diakses dan terjangkau, meskipun aspek penguatan pembiayaan belum menjadi prioritas utama. Dengan adanya program subsidi ini diharapkan UMKM berkembang tanpa harus memikirkan bunga pinjaman.

Selain pinjaman dengan bunga 0% Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo juga memberikan pelatihan: pelatihan pemasaran kami tidak mengajarkan umkm untuk melebih-lebihkan produk mereka supaya laku, tapi diajarkan bagaimana pemasaran yang baik, benar dan menarik

konsumen untuk melihat produk mereka (Mathis & Jackson, 2005). Dengan cara edukasi kepada UMKM mengenai pentingnya kewajiban perpajakan dan cara memenuhinya dengan benar untuk membangun reputasi yang baik dan amanah. Pelatihan pembukuan yang akuntabel yaitu melatih umkm untuk menyusun pembukuan dan laporan keuangan secara akuntabel dan transparan, baik untuk kebutuhan internal maupun pelaporan kepada pihak terkait (Hajar, 2022). Pengelolaan limbah diajarkan cara pengolahan limbah yang tepat dan penghematan energi sebagai bagian dari praktik bisnis yang bertanggung jawab, pelatihan dengan digital atau menggunakan media sosial yang benar. Akan tetapi strategi pengentasan kemiskinan dengan cara pemberian pinjaman dengan bunga 0% tidak seluruhnya dimanfaatkan oleh pelaku UMKM selain itu pelaku UMKM juga terkendala beberapa persyaratan misalnya : tidak boleh punya hutang di bank lain, konsisten dagangannya, sudah berjalan 1 tahun usahanya, mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB). Dari permasalahan ini didapat data sejak pelaksanaan awal bulan Oktober hingga Desember program vorsa ini dari 40.482 pelaku UMKM hanya terdapat 1.414 pelaku UMKM yang mendaftar untuk menerima voucher usaha dengan bunga nol persen, sisa dari 40.482 pelaku UMKM hasil dari observasi yaitu kurang pemahamannya dalam pengajuan, tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), tidak tahu bahwa pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut mulai dari tidak mengikuti informasi yang ada, hingga pelaku UMKM yang baru memulai usahanya dan memang target dari Diskoperindag hanya 1.500 UMKM yang terealisasikan untuk Vorsa ini. Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa peran Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo dalam program pengembangan UMKM di Kabupaten Situbondo telah menjadi jembatan penting dalam praktik bisnis modern sekaligus menunjukkan peningkatan kapasitas intelektual pelaku UMKM.

KESIMPULAN

Strategi pengentasan kemiskinan melalui Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga Pinjaman kepada Pengusaha

Mikro di Kabupaten Situbondo dilaksanakan melalui Program Vorsa (Voucher Usaha, Pelatihan Kerja, dan Pinjaman Modal). Strategi yang dilakukan meliputi pemberian subsidi bunga pinjaman sebesar 0% untuk mempermudah akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, serta pemberian pelatihan dan pendampingan usaha guna meningkatkan kapasitas, produktivitas, dan daya saing UMKM sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendukung pengentasan kemiskinan. Sementara itu, faktor penghambat yang ditemukan antara lain masih rendahnya pemahaman pelaku UMKM terhadap mekanisme pengajuan program, keterbatasan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), persyaratan administrasi yang cukup ketat, adanya pinjaman pada lembaga keuangan lain, serta keterbatasan jangkauan layanan perbankan di beberapa wilayah Kabupaten Situbondo.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2016). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Kabupaten Situbondo Dalam Angka 2025*. Situbondo: BPS.
- Dunn, W. N. (2023). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fattah, A. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Harfa Creative.
- Hajar, S. (2022). *Pengantar Administrasi Publik*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary.
- Mathis, R. L., & Jackson, J. H. (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Salemba Empat.
- Marijan, K. (2005). Mengembangkan industri kecil menengah melalui pendekatan kluster. *Jurnal Insan*, 7(3), 216-225.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Bupati No. 52 Tahun 2025 Tentang Tatacara Pemberian Subsidi Bunga Pinjaman Kepada Pengusaha Mikro di Kabupaten Situbondo.